

Opini

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: opini.tribun.jateng@gmail.com, belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

Ada Apa dengan Profesor?

PROFESOR merupakan sosok paling dihormati dalam komunitas akademik. Namun demikian, apakah profesor tidak bisa salah dalam berpendapat? Jawabannya tentu bisa. Profesor dilahirkan oleh suatu tradisi keilmuan tertentu. Pengetahuan yang dimiliki seorang profesor tentang suatu realitas bisa jadi berbeda dengan profesor lainnya karena perbedaan sumber pengetahuan, filsafat ilmu, institusi pendidikan, dan juga konteks sosial-budaya yang melahirkannya.

Banyak kasus konflik sosial-budaya yang terjadi di sekitar kita tak terlepas dari perbedaan mazhab pengetahuan para profesor di kampus-kampus. Tidak hanya bertugas mengajar tetapi profesor juga memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang akan diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Mahasiswa-mahasiswa inilah nantinya yang akan menentukan wajah kebudayaan suatu masyarakat dengan menjadi birokrat, presiden, menteri, hakim, pengacara, pengusaha, guru, aktivis, jurnalis, dan seterusnya.

Dalam konteks penyebaran ilmu pengetahuan semacam itulah, profesor menjadi makhluk penting karena dia dianggap paling tahu dan otoritatif tentang suatu disiplin ilmu pengetahuan. Dalam posisi sangat penting semacam itu, tak salah jika profesor menjadi rujukan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari "kebenaran" atau "pengetahuan yang paling benar" yang sedang diperselisihkan. Mereka yang berselisih itu bisa jadi adalah bekas murid-muridnya di bangku kuliah.

Kehebohan muncul karena profesor juga macam-macam jenisnya. Bahkan dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, dua profesor boleh dan sah untuk berbeda pandangan. Apa-

lagi sepuluh atau seratus profesor. Kenapa bisa begitu? Karena sebelum menjadi profesor, mereka juga diajar oleh profesor-profesor mereka yang bermacam-macam pula latar belakangnya. Seorang profesor lahir dari rahim pengetahuan para bapak ibu profesor mereka yang juga merupakan anak-anak dari kakek buyut profesornya, dan seterusnya. Namun tak perlu pula untuk tahu si-apakah profesor pertama dan slapa pula yang menahbiskannya.

Lalu bagaimana cara memilih profesor yang paling "obyektif" atau "paling netral" sebagai saksi ahli atau semacamnya? Tetapi apakah "obyektivitas" itu sesuatu yang mungkin ada dari seorang profesor? Jika "obyektivitas" itu mungkin, mengapa terjadi perbedaan pandangan di kalangan profesor tentang satu hal?

Apakah untuk menjaga "obyektivitas", seorang profesor, sebagaimana layaknya ilmuwan, harus menjaga jarak dari realitas? Atau justru untuk mendapatkan "obyektivitas", ia harus masuk dan bergelut sepenuhnya dengan suatu realitas? Jika ia masuk ke dalam realitas, apakah kaum profesor mungkin menjadi kaum yang "netral", yang bebas nilai, yang sama sekali tidak memihak? Apakah mungkin seorang profesor, khususnya profesor ilmu sosial-humaniora, bisa lepas dari nilai-nilai yang diyakininya yang pasti subjektif sifatnya?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu perlu diajukan agar publik bisa menempatkan kaum profesor dalam posisi yang sewajarnya; menghormati tanpa terjerumus pada memitoskannya sebagai pembawa kebenaran mutlak. Memitosiskan dengan justru bertolak belakang dengan semangat rasionalisme komunitas akademik.

Profesor sebagai Manusia Biasa

Saya teringat pengalaman beberapa tahun lalu ketika kasus Ahok baru mulai berjalan. Seorang kolega dosen senior dari suatu kampus paling ternama di ibukota memerlukan telepon saya untuk membantu mencari nama pakar linguistik yang mau menjadi saksi ahli dalam kasus Ahok. Sontak saya kaget karena saya bekerja di universitas yang relatif kecil di kota kecil dan masih relatif baru sebagai fakultas yang bergerak dalam kajian bahasa. Secara spontan saya bertanya kepada kolega tersebut: "Mengapa tidak dari kampus bapak saja yang sudah sangat mapan dalam kajian bahasa dan sudah memiliki puluhan guru besar linguistik?" Jawaban beliau membuat saya kaget. "Tidak ada yang mau! Tidak ada yang berani".

Pengalaman ini sangat membekas dalam hati saya lantaran mengusik kembali kegelisahan tentang tarik-tolak antara "objektivitas" vs "subjektivitas" seorang ilmuwan seperti yang sudah saya paparkan di muka. Kalau demikian halnya, maka keberanian, ketakutan, kegelisahan, kepedulian, ketidakpedulian, keberpihakan, ketidakberpihakan dan sebagainya merupakan hal-hal yang lumrah ada dalam diri seorang ilmuwan.

Sekalipun ia seorang profesor, ia tetaplah seorang manusia biasa yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai subjektivitasnya. Hal-hal subjektif inilah yang menuntun seorang

ilmuwan untuk akhirnya bersedia terlibat menjadi saksi ahli atau tidak. Hal ini dikarenakan subjektivitas kerap atau bahkan dengan sendirinya melebur dalam obyektivitas. Apalagi jika ia seorang ilmuwan sosial-humaniora. Mengapa? Karena ia sendiri adalah bagian dari realitas sosial-humaniora yang sedang dilamatnya. Ia bukan atau bahkan tak pernah berada di luar realitas tersebut.

Kalau demikian halnya, lalu bagaimana cara memilih saksi ahli di persidangan? Seperti telah kitaaksikan, masing-masing kubu memilih para pakar yang cenderung mendukung argumen mereka. Hal semacam itu rupanya dibenarkan di pengadilan kita. Toh akhirnya yang memutuskan suatu perkara bukanlah pakar-pakar itu melainkan hakim yang juga manusia

biasa yang juga mantan mahasiswa profesor entah kubu yang mana.

Tulisan ini saya siarkan semata agar publik awas bahwa pendapat seorang pakar atas suatu kasus, sekalipun ia seorang profesor, bukanlah satu-satunya kebenaran final. Pendapat tersebut berkemungkinan benar atau salah. Juga, berkemungkinan berbeda dengan pakar atau profesor lainnya. Apalagi jika ia berpendapat di luar kepakarannya. Sebagai ilmuwan, profesor tentu boleh salah dalam berpendapat. Akan tetapi ia tidak boleh berbohong. Inilah darma paling berat bagi kaum ilmuwan. (*)



MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN
PENGAJAR FAKULTAS ILMU BUDAYA, UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN, PURWOKERTO